



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 36 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang :**
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditindak lanjuti bersama.
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur, Ogan Komring Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  5. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;  
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang pajak Daerah;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah khususnya pelayanan publik yang memerlukan KSWP;
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah Kontribusi masyarakat kepada daerah baik pribadi atau badan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat;
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum melakukan layanan Publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak;
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajakatas layanan Publik tertentu pada Perangkat Daerah;
9. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan daerah atau ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disingkat DPMPSTP.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan tatacara pelaksanaan KSWP terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan.

#### **Pasal 3**

Tujuan KSWP adalah :

- a. tercapainya penerimaan pajak dan retribusi yang optimal.
- b. tercapainya kepatuhan Wajib Pajak yang optimal.
- c. tercapainya tingkat pengetahuan dan kemampuan aparatur PARA PIHAK dibidang perpajakan yang profesional dalam melaksanakan tugasnya.

- d. pemamfaatan data dan informasi pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; dan
- f. terwujudnya harmonisasi ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang pajak dan retribusi.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tata cara pelaksana KSWP;
- b. jenis layanan publik tertentu yang dilaksanakan KSWP;
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;
- d. perangkat daerah yang bertanggung jawab pelaksanaan KSWP;
- e. pendanaan; dan
- f. pelaporan.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN KSWP**

##### **Pasal 5**

- (1) Perangkat Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
  - a. bukti lunas Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
  - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
  - c. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data pada Bapenda
- (2) Apabila pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melakukan KSWP kepada DPMPTSP
- (3) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) sudah sesuai dengan data pada DPMPTSP maka Perangkat Daerah menyetujui permohonan pemohon.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) tidak sesuai dengan data pada Bapenda maka Perangkat Daerah menolak untuk selanjutnya pemohon melengkapi bukti lunas PBB-P2 atau BPHTB.
- (5) Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada DPMPTSP untuk Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam lampira 1 (satu)

### **BAB V**

#### **JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU**

##### **Pasal 6**

Layanan Publik Tertentu yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang memerlukan KSWP terdiri dari :

- a. Izin Usaha Perdagangan;
- b. Izin Usaha Hiburan;
- c. Izin Mendirikan Bangunan;

- d. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan dan Catering;
- e. Izin Usaha Hotel, Villa, Pemondokan;
- f. Izin Trayek;
- g. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
- h. Izin Reklame

**BAB VI**  
**PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH**  
**Pasal 7**

DPMPTSP melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada wajib pajak sebelum memberikan keterangan status wajib pajak.

**BAB VII**  
**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KSWP**  
**Pasal 8**

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan KSWP adalah perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 9**

Pendanaan pelaksanaan KSWP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IX**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 10**

Pelaporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku Pembina dan pengawas pelaksana KSWP pada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 2 Juli 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

  
ARDHA MUNIR, SH, M.Si  
NIP. 196311111985031007